

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Dengan Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening

Angga Nikolas K. Dien^{*}, Wa Ariadi^{**}, dan Jack H. Syauta^{***}

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{**} Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{***} Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Cenderawasih

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025

Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

Teknologi Informasi,
Sistem Pengendalian Internal,
Penatausahaan Aset tetap,
Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRAK

Abstract : *This study aims to examine and analyze the influence of information technology utilization and internal control systems on the quality of local government financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jayawijaya Regency, with fixed asset administration as an intervening variable. The research method used is an explanatory pattern with a quantitative approach. The research sample consists of 37 employees in the Accounting and Budgeting Division of BPKAD Jayawijaya Regency, selected using a saturated sampling technique. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) via Smart-PLS 4.0 software. The results of the study show that: (1) Information technology utilization significantly affects the quality of financial reports; (2) Internal control systems significantly affect the quality of financial reports; (3) Information technology utilization significantly affects fixed asset administration; (4) Internal control systems significantly affect fixed asset administration ; and (5) Fixed asset administration significantly affects the quality of financial reports. Overall, this research model has a very strong predictive value, where the independent variables are able to explain 96.3% of the variation in the quality of financial reports.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya, dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah pola eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 37 pegawai pada Bidang Akuntansi dan Anggaran BPKAD Kabupaten Jayawijaya yang diambil menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) melalui perangkat lunak Smart-PLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap; (4) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap ; dan (5) Penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki nilai prediktif yang sangat kuat, di mana variabel independen mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan sebesar 96,3%.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Wa Ariadi,
Dosen Program Studi Magister Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura - Papua
E-Mail : waariadi70@gmail.com

Pendahuluan

Sistem pemerintahan pada setiap daerah di Indonesia terus berupaya memperbaiki kualitas dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah disusunnya. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi instansi publik. Di Indonesia laporan keuangan dikaji untuk memenuhi tuntutan terhadap lembaga publik yang semakin menguat baik pusat maupun daerah. Laporan keuangan memiliki peran memberikan informasi penting bagi posisi keuangan dalam hasil kerja yang dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan keluaran atau hasil kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelola keuangan. Penyusunan LKPD menandakan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Oleh karenanya, laporan keuangan harus menyajikan informasi dengan karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mahmudi, 2016). Indikasi semakin berkualitasnya pengelolaan keuangan daerah dapat ditandai dengan semakin banyaknya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian LKPD yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil pemeriksaannya. Opini WTP merupakan salah satu poin penting yang menjadi tolak ukur transparansi keuangan daerah yang dilakukan dengan wajar, bebas dari salah saji material, serta selaras dengan peraturan keuangan. Pemerintah kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, untuk pertama kalinya menyandang opini WTP pada Tahun 2019 atas hasil pemeriksaan BPK pada LKPD tahun anggaran 2018. Diraihnya opini WTP yang pertama ini tentunya bukan tanpa meninggalkan catatan-catatan masalah dari BPK. Catatan-catatan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi maupun Kabupaten /Kota. Sehingga Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan semua permasalahan yang tercantum dalam LKPD nya agar menghasilkan LKPD yang lebih berkualitas.

Guna mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Organisasi sektor publik sebagai badan yang identik dengan pemerintahan negara dan berorientasi kepada kepentingan publik. Dan sebagai representasi negara, organisasi sektor publik memiliki peran yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sehingga selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Prayoga and Yuhertiana, 2021).

Laporan keuangan sendiri merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya harus mampu menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas baik harus dimiliki oleh suatu perusahaan, dikarenakan hal itu menjadi salah satu faktor keberhasilan dari suatu organisasi. Adanya tuntutan bagi sebuah organisasi untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan inovasi agar dapat tetap bertahan dan tetap stabil dalam era globalisasi ini. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketentuan tersebut menerapkan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, terukur atau sebanding dan dapat dipahami. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan disajikan bebas dari kesalahan penyajian ide dan kesalahan material, objektif dan dapat diverifikasi guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang keagamaan dan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Menurut Dwiyanto (2008) kemajuan ilmu pengetahuan di bidang informatika dan komunikasi telah memberi kesempatan pemerintah menjalankan visi misi pelayanan kepada publik secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjawab tantangan global dengan mengembangkan pemerintah yang lebih demokratis.

E government bagian dari pelayanan publik yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. (Riani et al, 2021) mengemukakan bahwa *e government* merupakan implementasi kebijakan yang mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan akses layanan bagi publik. Era modern yang serba digital memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat membantu dalam melaksanakan system pemerintahan yang baik dan transparan. Terutama bagi pemerintah daerah yang dituntut untuk merancang dan merumuskan sendiri program pembangunannya dengan menyediakan informasi sedetail mungkin mengenai program pembangunan yang akan dilakukan. Salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemanfaatan teknologi informasi ini salah satunya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *e government* di tingkat pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi di tingkat pemerintahan daerah dilakukan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai perencanaan pembangunan, informasi keuangan daerah dan informasi pelayanan publik mampu ditampilkan secara transparan kepada masyarakat. Selain dari factor tersebut, maka factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi, menurut (Rizal Faizal, 2018) adalah bagian atau sistem dari suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun informasi keuangan guna menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal dan internal organisasi. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda tergantung pada tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. Sistem informasi akuntansi yang baik harus dioperasikan oleh sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang andal. Hal penting lainnya yang tidak dapat diabaikan guna mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas ialah sistem pengendalian internal. Tingginya kualitas Laporan Keuangan daerah Kabupaten Jayawijaya juga ditentukan oleh kualitas pengelolaan dari pengendalian internal institusi Pemerintah. Pengendalian internal yang lemah menyulitkan pendeteksian kecurangan serta ketidakakuratan dalam proses akuntansi, sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Wujud dari pelaksanaan dan penerapan sistem informasi di tingkat pemerintahan daerah adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dirancang untuk merumuskan perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan tujuan agar perencanaan pembangunan tercover dalam satu kesatuan. SIPD merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD ini merupakan sistem yang mendokumentasi dan mengadministrasi serta memproses bahan pembangunan daerah, yang didalamnya memuat tentang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang disajikan dalam bentuk informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi yang ada di dalam sistem informasi ini nantinya akan terkumpul dalam satu data base sebagai bentuk mewujudkan ide Satu Data Indonesia dan akan dipakai sebagai acuan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan tentang SIPD maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk memberi landasan yuridis kepada daerah untuk membuat rencana strategis melalui penyusunan anggaran daerah seperti Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terkait pembangunan di daerah. Rencana strategis yang dilakukan akan terbentuk melalui draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga pada penetapan APBD. Bagian sistem informasi keuangan daerah di SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasi dan mengolah semua sistem keuangan daerah yang terintegrasi secara elektronik dalam bentuk informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah dan informasi keuangan daerah lainnya. Informasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik yang pelaporannya dilaksanakan secara bulanan/semester/tahunan. Penerapan SIPD diharapkan memudahkan proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bendahara sehingga pelaksanaan perencanaan, penganggaran pemanfaatan dan pengelolaan dan pelaporan keuangan lebih cepat, lebih efektif, efisien dan lebih transparan.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang dikutip oleh Susanto (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang

meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/2004. Sementara itu menurut Agoes (2016) menyatakan bahwa sistem Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan *absolute*, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna (Faridah dan Noviyanti, 2017). AICPA Profesional standards (dalam Agoes, 2016) mengidentifikasi lima unsur *internal control* yaitu *Control environment, risk assessment, information and communication, control activities and monitoring*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Menurut Yusuf (2015) pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, selain itu pengelolaan aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdaya guna dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan aset daerah (Mendagri, 2016) dimana dalam penatausahaan aset daerah upaya pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Fenomena permasalahan terkait penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan hasil pemeriksaan PBK, tahun 2023 dimana masih terdapat aset yang belum jelas pengelolaannya termasuk kepemilikannya sehingga bertahun-tahun tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko, Irawan, Machmuddah, & Laras (2020), terhadap pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian

intern, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes dengan sampel sebanyak 40 SKPD, dan penentuan sampel berdasarkan purposive sampling dengan kriteria pejabat masing-masing SKPD yang memiliki kewenangan pencatatan, penyusunan, dan pelaporan. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menggunakan SPSS 25. Metode yang digunakan adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Asysyihatul Latifah (2017) yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini terjadi karena SPI yang diterapkan pada kantor tersebut belum maksimal. Walaupun sistem akuntansi sudah memadai, namun jika belum diterapkan secara efektif oleh SDM yang berkompetensi maka hal ini juga dapat menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Fenomena yang demikian bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian (Sandy Pradiastu Satria 1 * Zakaria 2, Fahrudin Pasolo 3, Muh Yamin Noch 4, Suratini) Universitas Yapis Papua menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Daerah, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Sementara itu pada hasil Penelitian Nurul Fathia dkk (2020) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir) dan penelitian Angreini dkk (2021) menunjukan bahwa Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan kota Jayapura, kedua penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Fazlurrahman, dkk (2021) menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Studi pada BPKA Kota Bandung.

Menurut Soemarsono (2014) mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar organisasi, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha organisasi. Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2014) yaitu merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pengertian Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2014) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Aset daerah tentunya akan menjadi bermanfaat ketika pengelolaan dilakukan berdasarkan pada prinsip penatausahaan aset daerah yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan serta efisiensi dan efektif, dan adanya pengawasan Mardiasmo dalam Puspitoarum (2016). Penatausahaan aset daerah yang baik tentunya akan menjadi salah satu variabel yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poae (2017) dan Anshari (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau masih banyak disajikan data data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) meningkat. Hal ini juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntansi publik.

Berdasarkan pada fenomena dan penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk membuktikan tentang permasalahan tersebut diatas yaitu dengan judul :.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?
5. Apakah Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?
6. Apakah Penatausahaan Aset Tetap memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?
7. Apakah Penataan Aset Tetap memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya?

Landasan Teori**Teknologi Informasi**

Pengertian, yang pertama yaitu dari (Manuhutu et al., 2021) teknologi informasi dan komunikasi merupakan penggunaan perangkat komputer baik perangkat keras maupun lunak yang dapat memudahkan suatu pekerjaan dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia untuk memproses serta mengelola data informasi yang dapat berupa data, suara maupun video. Dari pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan teknologi yang sepadan dan tidak dapat dipisahkan, artinya kedua teknologi tersebut saling berkaitan erat. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan demikian pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah penemuan atau alat pengolah data yang menghasilkan informasi, kemudian informasi tersebut dapat dengan cepat didistribusikan ke beberapa orang untuk disimpan dalam waktu yang lama.

Menurut Rintho (2018) pengertian teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Definisi teknologi informasi menurut Tata Sutabri (2014) adalah sebagai berikut: "Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan". Sedangkan menurut Romney & Steinbart (2016) mendefinisikan teknologi informasi merupakan komputer dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan dan memanipulasi data. "*The computers and other electronic devices used to store, retrieve, transmit and manipulate data*".

Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Penatausahaan Aset tetap

Penatausahaan aset daerah dalam penelitian ini adalah terlaksananya proses penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan pedoman teknis penatausahaan aset daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan aset daerah. Dimana menurut Mendagri (2016) indikator untuk mengukur Penatausahaan aset daerah adalah 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2). Pengadaan 3). Penggunaan 4). Pemanfaatan 5). Pengamanan dan pemeliharaan 6). Penilaian 7). Pemindahtanganan 8). Pemusnahan 9). Penghapusan 10). Penatausahaan dan pembinaan 11). Pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 No. 17 tahun 2007 lalu diperbarui dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris (KIB) dan pembuatan Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dalam penatausahaan barang

milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 181/PMK.06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa hasil penatausahaan aset tetap dapat digunakan dalam rangka: 1. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara/ Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; 2. Pengamanan administrasi terhadap aset (BMN/D); 3. Penyusunan neraca Pemerintah Daerah setiap tahun.

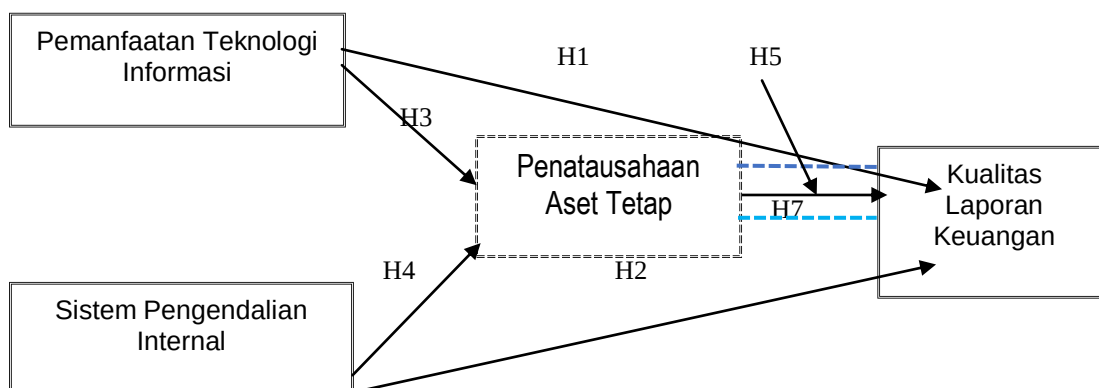
Indikator-indikator dari penatausahaan Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 adalah terdiri dari :

1. *Pembukuan*, yaitu Pengelolaan Barang Harus Melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang,
2. *Inventarisasi*, yaitu Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
3. *Pelaporan*, yaitu Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang; Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut, Hery (2015) menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Selain hal tersebut dijelaskan juga tentang “komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan”. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dalam pemerintahan tidak menyusun Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sehingga SKPD hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Terkait dengan pokok masalah dan tujuannya, penelitian ini menggunakan pola eksplanasi (*explanation*). Penelitian eksplanasi adalah penelitian yang menggambarkan pengaruh antara dua variabel atau lebih, yang bersifat simetris, kausal hubungan antara variabel dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Populasi dan Sampel

Menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya, secara khusus pada Bidang Akuntansi dan Anggaran dimana jumlahnya sebanyak 37 orang pegawai. Sesuai dengan pendapat Arikunto (2020) mengemukakan bahwa apabila subyek penelitian kurang dari 100 sebaiknya diambil seluruhnya. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang jumlahnya sebanyak 37 orang.

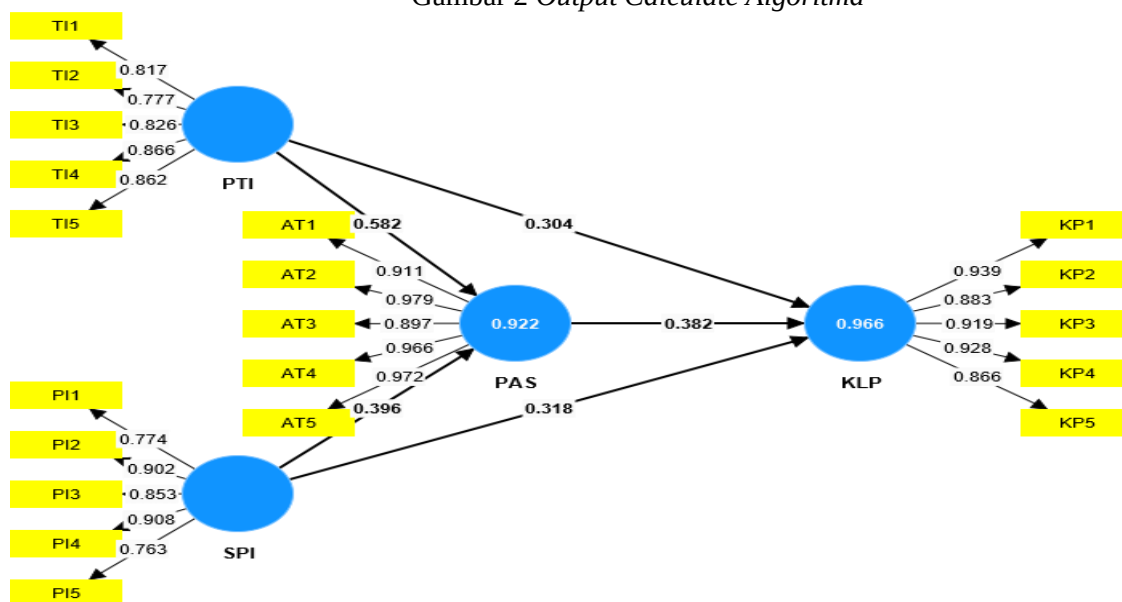
Analisa Data

Uji Instrumen Penelitian

a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis model pengukuran (Outer Model) dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data layak atau tidak pengukuran yang dilakukan. Langkah pertama dalam uji model pengukuran dalam PLS yaitu dengan membuat model structural yang di bentuk dari perumusan masalah dalam penelitian ini. Setelah dilakukan uji algoritma untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data penelitian maka di peroleh hasil pengujian sebagai berikut.

Gambar 2 Output Calculate Algoritma



Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil pengujian validitas digunakan guna mengukur sah atau valid item-item pertanyaan dalam kuesioner. Uji validitas terdiri dari terdiri uji convergent validity dan uji discriminant validity. Uji validitas di katakan valid apabila nilai loading faktor $\geq 0,70$ dan average variance extracted AVE $\geq 0,50$. Sedangkan uji reliabilitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan konsistensi data dalam suatu penelitian. Uji reliabilitas di lakukan dengan menggunakan nilai composite realibility dan cronbach alpha. Uji reliabilitas di katakan reliable apabila nilai composite realibility $\geq 0,70$ dan cronbachs alpha $\geq 0,70$ (Hair et al, 2019).

Pengukuran Convergent Validity merupakan pengukuran validitas konstruk. Validitas yang konvergen dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Ghozali, 2020;44). Nilai validitas pada output Smart PLS dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap item konstruk, di mana, jika nilai loading lebih besar dari 0,7, maka item tersebut valid digunakan sebagai indikator variabel latennya.

Hasil pengujian validitas dengan uji convergent validity dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Uji Convergent Validity (*Outer Loading*) Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Penataan Aset Tetap dan Kinerja Laporan Keuangan

Variabel	Item	Uji Validitas		Keterangan
		Outer Loading	AVE	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	TI1	0.817	0.689	Valid
	TI2	0.777		
	TI3	0.826		
	TI4	0.866		
	TI5	0.862		
Sistem Pengendalian Internal	PI1	0.774	0.710	Valid
	PI2	0.902		
	PI3	0.853		
	PI4	0.908		
	PI5	0.763		
Penataan Aset Tetap	AT1	0.911	0.896	Valid
	AT2	0.979		
	AT3	0.897		
	AT4	0.966		
	AT5	0.972		
Kinerja Laporan Keuangan	KP1	0.939	0.823	Valid
	KP2	0.883		
	KP3	0.919		
	KP4	0.928		
	KP5	0.866		

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tabel 1 Uji Convergent Validity (*Outer Loading*) untuk pengujian validitas, menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur oleh 5 item valid dengan nilai *outer loading*nya berkisar dari 0,777 – 0,866 lebih besar dari 0,70 ini berarti 5 item pengukuran tersebut valid mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi dan tingkat validitas konvergen yang ditunjukkan oleh nilai AVE 0,689 > 0,50 telah memenuhi syarat validitas konvergen yang baik.

Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan 5 item pengukuran dimana nilai *outer loading* berkisar dari 0,774 – 0,908, ini berarti ke 5 item pengukuran valid mengukur variabel sistem pengendalian internal dan tingkat validitas konvergen yang ditunjukkan dengan nilai AVE sebesar 0,710 > 0,50 telah memenuhi syarat validitas konvergen yang baik.

Variabel penatausahaan aset tetap diukur dengan 5 item pengukuran dimana nilai *outer loading* berkisar dari 0,897 – 0,939, ini berarti ke 5 item pengukuran valid mengukur variabel penatausahaan aset tetap dan tingkat validitas konvergen yang ditunjukkan dengan nilai AVE 0,896 > 0,50 telah memenuhi syarat validitas konvergen yang baik. Serta Variabel kinerja laporan keuangan diukur dengan 5 item pengukuran dimana nilai *outer loading* berkisar dari 0,866 – 0,939, ini berarti ke 5 item pengukuran valid mengukur variabel penatausahaan aset tetap dan tingkat validitas konvergen yang ditunjukkan dengan nilai AVE 0,823 > 0,50 telah memenuhi syarat.

b. *Composite Reliability*

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah sebuah indikator sudah pas penggunaannya untuk mengukur variabel tertentu. Pengukuran reliabilitas dengan *Composite Reliability* dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsisten dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. *Rule of Thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai *composite reliability* yang dihasilkan harus lebih besar dari 0,7 dan *cronbach's alpha* di atas 0,70 (Hair et al (2019)). Hasil pengujian *composite reliability* dan *cronbach's alpha* sebagai berikut :

Tabel 2 Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Uji Reliabilitas		Keterangan
	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,887	0,888	Realible
Sistem Pengendalian Internal	0.896	0.904	Realible
Penatausahaan Aset Tetap	0,970	0,972	Realible
Kinerja Laporan Keuangan	0,946	0.948	Realible

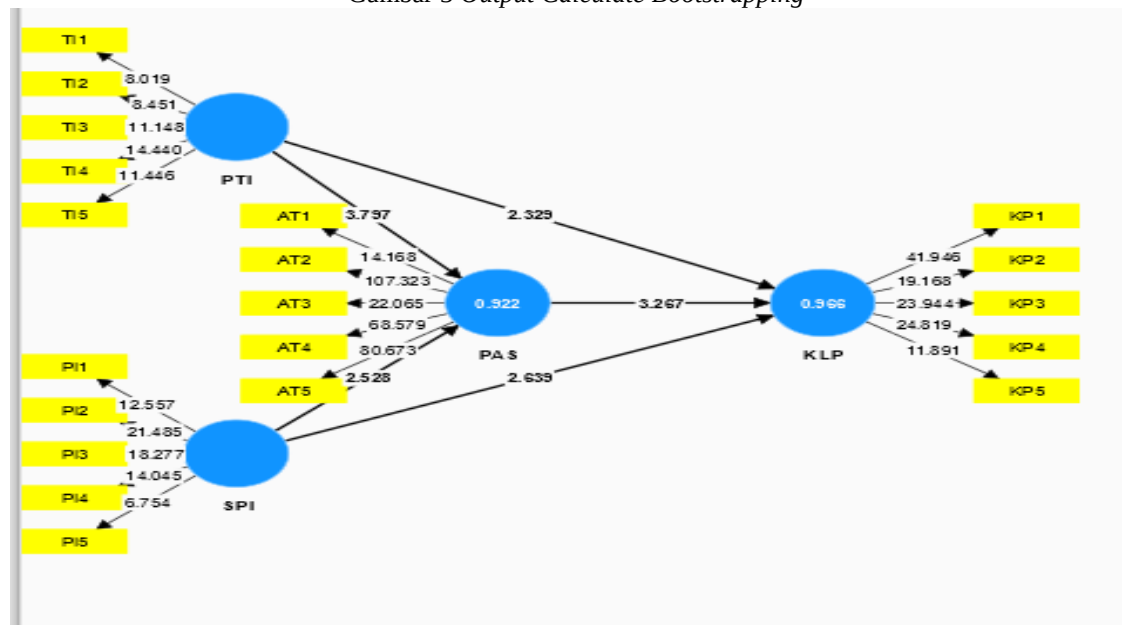
Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas dapat dilihat bawah setiap variabel dalam penelitian ini meliputi pemanfaatan tekno;ogi informasi, sistem pengendalian internal, penatausahaan aset tetaap dan kineerja laporan keuangan masing-masing memiliki nilai cronbachs alpha di atas 0,7 dan nilai composite reliability di atas 0,7. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa instrument penelitian ini telah memenuhi pengujian reliabilitas atau dapat di katakan realibel.

c. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Analisis model struktural atau inner model merupakan uji yang menggambarkan hubungan antar variabel laten, Inner model ini dievaluasi dengan melihat nilai R-Square pada konstruk endogen, untuk menguji Q2 predictive relevance, dan AVE untuk menguji predictiveness dengan prosedur resampling seperti bootstrapping untuk memperoleh stabilitas dari estimasi. Hasil output bootstrapping dihasilkan sebagai berikut.

Gambar 3 Output Calculate Bootstrapping



Sumber: Lampiran 3 diolah, 2025

Uji model structural terdiri dari 3 pengujian yaitu; r-square, path coefficient dan uji t signifikansi. Uji r-square di lakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Sedangkan uji path coefficient dan uji t dilakukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 3 Uji R-Square (R^2)

Variabel	R-Square	Ajusted R-Square
KLK	0.966	0.963
PAT	0.922	0.918

Sumber: Lampiran 3, Hasil SMARTPLS diolah 2025

Berdasarkan hasil tabel 3 di ketahui nilai Ajusted R-Square atau koeficient determinasi (R^2) untuk variabel penatausahaan aset tetap sebesar 0,918 atau (91,8). Hal ini menunjukkan bahwa variabel penatausahaan aset tetap dapat di jelaskan oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal, sedangkan sisanya sebesar 8,2% di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dan nilai Ajusted R-Square atau koeficient determinasi (R^2) untuk variabel kinerja laporan keuangan sebesar 0,963 atau (96,3%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja laporan keuangan dapat di jelaskan oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistim pengendeealian internal dan penatausahaan aset tetap, sedangkan sisanya sebesar 2,6% di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya untuk nilai *predictive-relevance* diperoleh dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.966) (1 - 0.922)$$

$$Q^2 = 0.9973$$

Hasil perhitungan memperlihatkan nilai *predictive-relevance* sebesar 0.9973 atau 99,73%, sehingga model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan. Nilai *predictive relevance* sebesar 99,73% mengindikasikan bahwa keragaman data yang dapat di jelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 99,73% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 99,73% dapat di jelaskan

oleh model tersebut. Sedangkan sisanya 0,27% dijelaskan oleh variabel lain (yang belum terkandung dalam model). Hasil ini dikatakan bahwa model PLS yang terbentuk sudah cukup baik, karena dapat menjelaskan 99,73% dari informasi secara keseluruhan.

Pengujian Hipotesa (*Inner Model*)

Pengujian hipotesa pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara partial dalam penelitian ini di analisa dengan menggunakan smart-PLS 4.0 hasil pada tabel 4.11, sebagai berikut.

Tabel 4 Pengujian Hipotesa Pengaruh Langsung

Hipotesa	Path Coeficient	T-statistic (> t tabel 1,670)	P-value (< 0,05 Sig)	95% Kepercayaan Path Coeficient		F Square
				Batas Bawah	Batas Atas	
PTI → KLK	0.304	2.329	0.020	0.110	0.619	0.241
SPI → KLK	0.318	2.639	0.008	0.084	0.548	0.330
PTI → PAT	0.582	3.797	0.000	0.289	0.902	0.618
SPI → PAT	0.396	2.528	0.012	0.068	0.693	0.286
PAT → KLK	0.382	3.267	0.001	0.139	0.602	0.335

Sumber: Lampiran 3, diolah 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pengaruh langsung pada tabel 4 diatas maka dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan path coeficient 0,304 dengan t statistik (2,329 > 1,687 dengan P value (0,020 < 0,05) ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan terletak antara 0,110 sampai 0,619. Dengan demikian keberadaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh yang sedang dalam level struktural (F square = 0,241). Untuk itu pentingnya peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dinilai sangat penting dimana ketika adanya kebijakan organisasi dalam peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka penigkatan Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,619.
2. Terdapat pengaruh signifikan Sistim Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan path coeficient 0,318, dengan t statistik (1,831 > 1,687 dengan P value (0,043 < 0,05) ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sistim Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh Sistim Pengendalian Internal dalam meniingkatkan Kualitas Laporan Keuangan terletak antara 0,084 sampai 0,548. Dengan demikian keberadaan disiplin kerja dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai mempunyai pengaruh yang sedang dalam level struktural (F square = 0.330). Untuk itu perlunya peningkatan Sistim Pengendalian Internal dinilai sangat penting dimana ketika adanya kebijakan organisasi dalam peningkatan Sistim Pengendalian Internal maka penigkatan Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,548.
3. Terdapat pengaruh signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan path coeficient 0.582 dengan t statistik (3.797 > 1,687) dengan P value (0,000 < 0,05) ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap terletak antara 0,289 sampai 0,902. Dengan demikian keberadaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mempunyai pengaruh yang kuat dalam level struktural (F square = 0,618). Untuk itu pentingnya peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dinilai sangat penting dimana ketika adanya kebijakan organisasi dalam peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka penigkatan Penatausahaan Aset Tetap akan meningkat sebesar 0,902.
4. Terdapat pengaruh signifikan Sistim Pengendalian Internal terhadap Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan path coeficient 0,396 dengan t statistik (2,528 > 1,687 dengan P value (0,012 < 0,05) menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sistim Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai terletak antara 0,068

sampai 0,693. Meskipun demikian keberadaan Sistim Pengendalian Internal dalam meningkatkan kinerja pegawai mempunyai pengaruh yang sedang dalam level struktural ($F \text{ square} = 0,268$). Untuk itu perlunya peningkatan Sistim Pengendalian Internal dinilai sangat penting dimana ketika adanya kebijakan organisasi dalam peningkatan Sistim Pengendalian Internal maka peningkatan Penatausahaan Aset Tetap pegawai akan meningkat sebesar 0,693 point.

5. Terdapat pengaruh signifikan Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan path coefficient 0,382, t statistik ($3,267 > 1,687$ dengan P value ($0,001 < 0,05$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan Penatausahaan Aset Tetap maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan terletak antara 0,139 sampai 0,602. Dengan demikian keberadaan Penatausahaan Aset Tetap dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh yang sedang dalam level struktural ($F \text{ square} = 0,335$). Untuk itu perlunya peningkatan Penatausahaan Aset Tetap dinilai sangat penting dimana ketika adanya kebijakan organisasi dalam peningkatan Penatausahaan Aset Tetap maka peningkatan Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,602 point.

Selanjutnya untuk uji mediasi di gunakan effect size mediasi ϵ^2 . Interpretasi nilai efek mediasi ϵ^2 mengacu pada yang di rekomendasikan oleh cohen dalam Ogbeibu et al (2020) yaitu 0,175 pengaruh mediasi tinggi, 0,075 pengaruh mediasi medium dan 0,01 pengaruh mediasi rendah. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung dapat di lihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Pengujian Hipotesa Pengaruh Tidak Langsung

Hipotesa	Path Coefficient	T-statistic ($> t$ tabel 1,96	P-value ($< 0,05$ Sig)	95% Kepercayaan Path Coefficient		Upsilon ϵ^2
				Batas Bawah	Batas Atas	
PTI $\rightarrow$ PAT $\rightarrow$ KLK	0,222	2,864	0,004	0,071	0,377	$(0,582)^2 \times (0,382)^2 = 0,049$
SPI $\rightarrow$ PAT $\rightarrow$ KLK	0,151	1,831	0,043	0,014	0,334	$(0,396)^2 \times (0,382)^2 = 0,022$

Sumber: Lampiran 3, diolah 2025

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pengaruh tidak langsung pada tabel 5 diatas maka dapat di jelaskan sebagai berikut.

- 1) Terdapat pengaruh signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui variabel intervening Penatausahaan Aset Tetap kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan path coefficient 0,151, t statistik ($1,831 > 1,687$) dengan P value ($0,042 < 0,05$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap dan Kualitas Laporan Keuangan dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan hingga 0,377 point. Dengan demikian keberadaan Penatausahaan Aset Tetap dalam memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dalam kategori mediasi sedang ($\epsilon^2 = 0,049$).
- 2) Terdapat pengaruh signifikan Sistim Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui variabel intervening Penatausahaan Aset Tetap kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan path coefficient 0,222, t statistik ($2,864 > 1,687$) dengan P value ($0,004 < 0,05$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sistim Pengelolaan Internal maka akan meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap dan Kualitas Laporan Keuangan dalam selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh Sistim Pengelolaan Internal dalam meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan hingga 0,334 point. Dengan demikian keberadaan Penatausahaan Aset Tetap dalam memediasi pengaruh Sistim Pengelolaan Internal terhadap Kinerja Laporan Keuangan dalam kategori mediasi sedang ($\epsilon^2 = 0,022$).

Pembahasan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan pengujian hipotesis terbukti kebenarannya, bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini berarti bertambah baiknya Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini di dukung oleh nilai

koefisien jalur bertanda positif, yang berarti semakin meningkat Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya maka akan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban terhadap indikator-indikator yang membentuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dimana secara rata-rata responden memberikan jawaban baik atau setuju terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada saat ini. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian Amil, MM2, Kukuh Todoyekti, (2020), dimana hasil menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara partial mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) sangat penting dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pengelolaan data keuangan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang tepat.

Peran pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: Peningkatan Efisiensi dan Kecepatan. TI memungkinkan pengelolaan data keuangan secara otomatis dan real-time, sehingga proses penyusunan dan penyajian LKPD menjadi lebih cepat dan efisien. Akurasi dan Konsistensi Data. Sistem TI yang terintegrasi membantu meminimalkan kesalahan manusia dalam pengolahan data keuangan, sehingga LKPD menjadi lebih akurat dan konsisten. Transparansi dan Akuntabilitas. TI memfasilitasi akses publik terhadap LKPD secara online, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik. Data keuangan yang akurat dan tepat waktu yang disediakan oleh TI membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Pemanfaatan TI yang tepat dapat meningkatkan kualitas LKPD, baik dari segi penyajian, keakuratan, maupun relevansinya dengan kebutuhan pengguna.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan pengujian hipotesis terbukti kebenarannya, bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini berarti bertambah baiknya Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini didukung oleh nilai koefisien jalur bertanda positif, yang berarti semakin meningkat Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya maka akan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban terhadap indikator-indikator yang membentuk variabel Sistem Pengendalian Internal dimana secara rata-rata responden memberikan jawaban baik atau setuju terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal yang ada saat ini. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian Amil, MM2, Kukuh Todoyekti, (2020), dimana hasil menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara partial mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal (SPI) berperan krusial dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan memastikan keandalan, akurasi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta mencegah kecurangan dan kesalahan. Peran SPI terhadap kinerja LKPD antara lain. Keandalan Pelaporan Keuangan: SPI yang kuat memastikan bahwa LKPD disajikan secara akurat dan dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Pencegahan Kecurangan dan Kesalahan: SPI membantu mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan, dan penyalahgunaan aset negara, sehingga meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap LKPD. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan: SPI memfasilitasi pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pengamanan Aset Negara: SPI berperan dalam melindungi aset negara dari pencurian, penyalahgunaan, atau kerugian lainnya, sehingga menjamin keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap Peraturan: SPI memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: SPI membantu meningkatkan kualitas LKPD, baik dari segi penyusunan, pencatatan, maupun penyajian, sehingga LKPD menjadi lebih bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan pengujian hipotesis terbukti kebenarannya, bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini berarti bertambah baiknya Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap. Hal ini didukung oleh nilai koefisien jalur bertanda

positif, yang berarti semakin meningkat Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya maka akan meningkatnya Penatausahaan Aset Tetap. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban terhadap indikator-indikator yang membentuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dimana secara rata-rata responden memberikan jawaban baik atau setuju terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada saat ini. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian

Faesar Fazlurahman, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2021), dimana hasil menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara partial mempengaruhi penatausahaan aset tetap. Teknologi informasi bermanfaat bagi pengguna untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah (Muda, I., 2019). Penggunaan teknologi informasi terkait manajemen aset daerah dianggap memiliki fleksibilitas, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mudah berinteraksi dengan kondisi sistem yang berbasis online (Goutama, E., 2019). Hal tersebut mengindikasikan jika teknologi informasi dimanfaatkan semakin baik dalam penyusunan laporan pemerintah daerah maka akan cenderung meningkatkan kualitas laporan pemerintah yang dihasilkan (Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, 2018). Hal ini sesuai dengan (Wahyuni, R., Fadah., Tobing, 2018) yang menyatakan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap penatausahaan aset tetap. Sehingga pemanfaatan TI yang digunakan secara maksimal maka penatausahaan aset tetap dapat berjalan dengan baik.

Pengaruh Sintim Pengendalian Internal Terhadap Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan pengujian hipotesis terbukti kebenarannya, bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari Sintim Pengendalian Internal terhadap Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini berarti bertambah baiknya Sintim Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap. Hal ini didukung oleh nilai koefisien jalur bertanda positif, yang berarti semakin meningkat Sintim Pengendalian Internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya maka akan meningkatnya Penatausahaan Aset Tetap. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban terhadap indikator-indikator yang membentuk variabel Sintim Pengendalian Internal dimana secara rata-rata responden memberikan jawaban baik atau setuju terhadap variabel Sintim Pengendalian Internal yang ada saat ini. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian Faesar Fazlurahman, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2021), dimana hasil menunjukkan bahwa Sintim Pengendalian Internal secara partial mempengaruhi penatausahaan aset tetap.

Sintim Pengendalian Internal memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan aset daerah. apabila laporan pemerintah ingin ditingkatkan kualitasnya, maka hendaknya Pemerintah lebih mengefektifkan implementasi unsur-unsur Sintim Pengendalian Internal di lingkungan Pemda untuk mengontrol dan mencegah penyimpangan terjadi dalam pengelolaan aset tetap.

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan pengujian hipotesis terbukti kebenarannya, bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini berarti bertambah baiknya Penatausahaan Aset Tetap maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini didukung oleh nilai koefisien jalur bertanda positif, yang berarti semakin meningkat Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya maka akan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban terhadap indikator-indikator yang membentuk variabel Penatausahaan Aset Tetap dimana secara rata-rata responden memberikan jawaban baik atau setuju terhadap variabel Penatausahaan Aset Tetap yang ada saat ini. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian Faesar Fazlurahman, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2021), dimana hasil menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Tetap signifikan mempengaruhi Kinerja Laporan Keuangan.

Penatausahaan aset tetap yang baik sangat penting untuk kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) karena memastikan akurasi dan keandalan informasi keuangan, yang pada gilirannya mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan public. peran penatausahaan aset tetap dalam kinerja laporan keuangan pemerintah daerah adalah. Akurasi dan Keandalan Informasi Keuangan: Penatausahaan aset tetap yang baik, yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, memastikan bahwa aset tetap dicatat dengan benar dan akurat, sehingga informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD menjadi lebih andal. Transparansi dan Akuntabilitas: Penatausahaan yang tertib membantu pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk mengenai aset yang dimiliki dan penggunaannya. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Penatausahaan aset tetap yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas LKPD secara keseluruhan, karena aset tetap merupakan

bagian penting dari aset pemerintah daerah.

Penatausahaan Aset Tetap Memediasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan model analisis jalur (inner model) pada penelitian ini variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur positif dan signifikansi, yang artinya hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan signifikan. Disisi lain hubungan variabel Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur positif dan signifikansi, yang artinya hubungan Penatausahaan Aset Tetap dengan Kualitas Laporan Keuangan signifikan.

Dengan demikian hasil pengujian hipotesa terbukti bahwa Penatausahaan Aset Tetap dapat memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki peranan penting dalam menjembatani hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan/ Dengan demikian maka oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi harus bertujuan meningkatkan penatausahaan aset tetap secara signifikan.

Penatausahaan Aset Tetap Memediasi Pengaruh Sistim Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan model analisis jalur (inner model) pada penelitian ini variabel Sistim pengelolaan informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur positif dan signifikansi, yang artinya hubungan Sistim pengelolaan informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan signifikan. Disisi lain hubungan variabel Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur positif dan signifikansi, yang artinya hubungan Penatausahaan Aset Tetap dengan Kualitas Laporan Keuangan signifikan.

Dengan demikian hasil pengujian hipotesa terbukti bahwa penatausahaan aset tetap dapat memediasi pengaruh sistim pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki peranan penting dalam menjembatani hubungan sistim pengelolaan internal dengan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian maka oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui sistim pengelolaan informasi harus bertujuan meningkatkan penatausahaan aset tetap secara signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka selanjutnya dapat dibuat kesimpulan sebaik berikut :

1. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
2. Variabel sistim pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
4. Variabel sistim pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
5. Variabel penatausahaan aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
6. Penatausahaan Aset Tetap dapat memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
7. Penatausahaan Aset Tetap dapat memediasi pengaruh Sistim Pengelolaan Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Saran

Dari hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, disarankan agar terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian dari pegawai tersebut, agar dapat menghasilkan pekerjaan terkait dengan laporan keuangan yang ada.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya untuk membenahi teknologi informasi pada setiap SKPD agar lebih terintegrasi dengan seluruh instansi terkait agar kualitas data yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan akurat.

3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan menambah variabel penelitian seperti perilaku pemimpin, budaya organisasi, komitmen pimpinan, dan lain sebagainya. Agar diperoleh informasi yang lebih kuat dan akurat mengenai fenomena yang terjadi terkait kualitas laoran keuangan.

Daftar Pustaka

- Agustina, H., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Journal Of Banking And Financial Teknologi*,
- Anggriawan, F., Yudianto, I. (2018). *Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement*. *Journal of Accounting Auditing and Business*,
- Alrifin, J. F., & Pratolo, S. (2012). *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Model Delone Dan Mclealn*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 13(1), 28–34.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Anshari. (2016). *Pengaruh Penatausahaan aset daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*.
- Erlina. (2018). *Determinant Analysis Of The Quality Of Local Government Financial Statements In North Sumatra With The Effectiveness Of Management Of Regional Property As A Mediator*.
- Elfina, N., & Agussalim, M. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam*. *Pareso Jurnal*, 2(3). <http://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/154> , diakses 20 Oktober 2020.
- Fazlurahman, dkk (2021), *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening* (Studi pada BPKA Kota Bandung) *Jurnal KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 12, No. 2, pp. 250-265 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 hal. 190-196 Januari 2021.
- Febrianti, S. (2016). *Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya*. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10(1)
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat*. *Land Journal*, 1(1), <https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/jurnalland/article/view/557> , diakses 25 Oktober 2020. Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020).
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi sektor bablik: akuntansi keuangan daerah, edisi revisi*. Jakarta. Salemba empat
- Hasdiana, Hasang, I. (2018). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3)
- Haza, I. I. (2015). *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah* (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1604>, diakses 1 Agustus 2021.
- Helmi Prila Aldino dan Renil Septiano (2021), *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Menara Ekonomi*, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 2. 2021.
- Heru Rochmansjah dan Chabib Sholeh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). *Factors Affecting Regional Government Financial Statements : Evidence from Indonesia*. (32), 89–100.
- Jugiyanto Hm, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Andi : 2008
- Kusufi, A. H. dan M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khoirunisa, A. (2019). *“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo)”* Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Loe Mau, C., Yanti Sonbay, Y., Paulina Bibiana, R., Perseveranda, M. E., A. Manafe, H., & Man, S. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu*. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1), 289–299. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1432>.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru, ISBN: 978-979-29-6972-6 Yogyakarta 2018.
- Marini, N. K. D., & Wati, N. W. A. E. (2021). *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Manajemen Terhadap Kinerja Individu Dengan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Pemoderasi*.
- Mendagri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan aset daerah.*, (2016).
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. AFRE (Accounting and Financial Review), 3(2), 152–158.
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua* (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). Akuntabel, 14(1), <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/8228>, diakses 26 Oktober 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rendika, M. (2013). *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset* (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang). Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Bjb Syariah Cirebon*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syaria'ah, 8(2). Diakses 5 Desember 2020.
- Rusman. (2017). *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh* (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh).
- Sofyan, H. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Therisyantari, N. K. R., & Suaryana, I. G. N. A. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Manajerial BPR Tabanan. E-Jurnal Akuntansi, 32(4), 889. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p05>.
- Tommy Ferdian, (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo) Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 5 Edisi Halaman 35-48, Desember 2021
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Widiati, W., Nugraha, A. A., & Novianty, I. (2021). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung*. Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 253-260.